Pesanteren

Shohibul Anshor Siregar

Indonesia. Tak Cuma sebuah negeri berbhinneka Tunggal Ika dan tak lengkap juga jika tak disebutkan sebagai negeri berpenduduk mayoritas muslim (SP 2010 oleh BPS menyebut umat Islam mencapai 87,16%). Dunia mencatat itu.

Perkembangan ke depan dalam peta keagamaan dunia pun cukup menggelisahkan pihak-pihak tertentu. Gerakan penyadaran keislaman muncul di Timur dan di Barat. Modernisasi maupun kebangkitan terus diijthadkan, melebihi harapan-harapan pada sejarah masa lalu. Tetapi semua ini adalah agenda yang sangat sulit.

Islam politik itu bukan gejala baru. Jika ada yang menerjemahkan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia, maka mengapa pula ada yang sangat semberono menyebut Islam tak pernah berbicara secara qoth'i tentang Negara?

Mengenai hubungan agama dan Negara, terutama jika kita menelaah sejarah pembentukan Indonesia, tentu kita sangat sadar bahwa semua agama dan kekuatan ideologi yang ada di sini terus-menerus bergulat memperebutkan hak asuh terhadap Negara. Itu sangat tak aneh.

Jika dalam Al-quran misalnya ada ayat-ayat kepemimpinan semisal Al-Maidah 51 yang dinistakan oleh Ahok itu, di dalam agama lain juga ada cita-cita yang sama. Ingatlah ketika JE Sahetapy menyebut "jika Ahok sudah menjadi Gubernur (menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden RI), itu artinya firman sudah digenapi, sesuai Penghotbah 3 ayat 1 (Semua itu ada waktunya).

JE Sahetapy yang mengklaim berjasa merubah pasal dalam konstitusi tentang persyaratan menjadi seorang presiden yang sudah memperbolehkan siapa saja tanpa harus melihat ia warga negara Indonesia asli atau tidak, juga menyebut bahwa di dalam Al-Kitab terdapat proklamasi kekuasaan (Segala kuasa telah kuberikan kepada Jesus Kristus) dan juga proklamasi kesetiaan (Aku menyertaimu sampai akhir zaman).

Jadi, perlulah ajakan memandang dunia dan segenap fenomenanya dengan kacamata keadilan dan kejujuran, jangan hanya berkutat pada tuduhan-tuduhan menggelikan seperti terorisme dan semacamnya itu. Amat tak nalar.

Kemaren-kemaren ada isu baru tentang dunia Islam Indonesia. Silih berganti. Aksi Bela Islam I, II dan III terus menggelindingkan kesadaran baru umatnya tentang obligasi moral dan hak-hak normatifnya yang wajib terbebas dari perlakuan buruk termasuk penistaan. Tetapi bak petir di siang bolong muncul lagi susulan isu tentang pendidikan pesanteren. Emang ada apa? Kira-kira bagaimana ya pandangan bapak Menteri Agama RI soal ini?

Masalahnya adalah, mengapa pesanteren sangat penting disorot dan mengapa ada orang non-muslim yang bersedia melakukan investasi besar di sana dengan menggandeng nama-nama besar dari kalangan muslim? Panjanglah ceritanya ya. Selain untuk beroleh dukungan politik, tentu saja tidak tertutup kemungkinan adanya

maksud-maksud lain. Mari menduga-duga dengan mencocokkan data yang dapat kita kumpul.

“No longer do terrorist groups affiliate themselves with a global cause or ideology; rather, they mostly emerge from the splinters of Jemaah Islamiyah and Darul Islam. The current generation of Indonesian jihadists also comes from ordinary public schools rather than Islamist boarding schools (pesantren), and they often form from small but radical religious study groups (pengajian) in different parts of the country. Similarly, the main bases of terrorist operations in the country have also shifted to Poso region in central Sulawesi”.

Pernyataan di atas tercantum dalam “Indonesia’s Struggle Against Terrorism” yang ditulis oleh Iis Gindarsah, Researcher, Department of Politics and International Relations, Centre for Strategic and International Studies, and Visiting Researcher at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, pada tanggal 11 Apr 2014 yang lalu.

Tuduhan terhadap pesanteren sebagai gudang potensil bagi muasal teroris masa depan itu (cikal bakal) sudah cukup lama juga, dan kini masih belum begitu kuat pertimbangan informasi dan opini yang melawan itu. Bayangkanlah jika seorang non-muslim berkata kepada dunia hari ini “Hei dunia, saya sudah amankan sumber teroris di sebuah negeri yang selama ini kalian khawatirkan pertumbuhan populasi terorismenya”, saya yakin ia sangat potensil beroleh hadiah noble tahun depannya.

Maklum, media sudah cukup lama digenggam oleh para penguasa ekonomi dan politik, baik di dalam mau pun di luar negeri. Dengan strategi framing, kebenaran adalah apa yang dikehendaki oleh penguasa yang mengendalikan pemberitaan dan opini media.

Tentu kita tak begitu asing dengan pendapat bahwa media itu sebetulnya adalah semacam partai politik juga, dengan visi, misi, platform, program dan agenda sendiri untuk beroleh tidak saja uang, tetapi lebih penting tujuan politik yang disertai atau menyertai kapitalisasi.

Mengukuti pola pikir yang didasarkan pada tuduhan peyoratif kepada umat Islam khususnya lembaga pendidikan pesanteren, maka menjadi sangat masuk akal kemudian program-program deradikalisasi yang digencarkan di Indonesia memiliki nilai strategis tersendiri jika akan dimulai dari pesanteren. Mulai dari persemaiannya. Bukankah begitu gerangan?

“Ketersinggungan” yang mengemuka dari Sumatera Barat bagi saya sangat cukup beralasan terhadap kasus ini. Betapa tidak, menerima kehadiran non muslim pada institusi paling dasar bagi regenerasi, adalah malapetaka besar.

Perhatikan, setiap agama di Indonesia rata-rata memiliki sekolah sendiri, yang dirancang mulai dari pra-sekolah hingga perguruan tinggi. Mengapa mereka melakukan itu? Kaderisasi. Tak lain dari maksud memastikan generasi yang kuat di masa depan yang akan menjadi tumpuan harapan estafeta perjuangan agama masing-

masing. Memang Indonesia memandang pendidikan itu merupakan kombinasi prakarsa Negara dan masyarakat. Masyarakat diberi hak penuh oleh regulasi yang ada untuk mendesign model pendidikannya dengan warna ideologi khas tertentu yang dia anut.

Jadi mengapa kau serahkan lembaga pendidikan keagamaanmu yang paling vital kepada orang yang tak seagama denganmu? Itulah kemarahan dari Sumatera Barat. Dengarkanlah itu. Tak salah lagi itu. Untung masih ada suara dari Sumatera Barat. Terimakasihku untukmu, bundo kandung.